

KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

**Sulaiman
Abdullah**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Email: sulejman11@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to demonstrate empirically whether human resources, infrastructure, information technology, organizational commitment, and accounting policies affect the readiness of the implementation of Government Accounting Standards based on accrual. The sample in this research is the employee who is in the sub-section of finance, assets, treasury and accounting fields, and field DPPKA budget of the city of Bengkulu. Respondents in this study amounted to 32 people. This study uses quantitative methods. The results of the study showed that the human resources, infrastructure, information technology, and organizational commitment positively affects the readiness of the implementation of Government Accounting Standards based on accrual. While the accounting policies are not influence on the readiness of the implementation of Government Accounting Standards based on accrual. The results of this study indicate that accounting understanding that each employee is not enough in the implementation of government accounting standards accrual basis.

Keywords: SAP Application readiness, Cash Basis, and Accrual Basis of Accounting.

PENDAHULUAN

Prinsip tata kelola yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diterapkan oleh semua negara di dunia tanpa terkecuali Indonesia. Perubahan prinsip yang terjadi dalam pemerintahan saat ini, mendorong pemerintah mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan jalan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabel sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Untuk mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik khususnya prinsip akuntabilitas maka diperlukan adanya perubahan mendasar, salah satunya bidang akuntansi pemerintahan. Proses akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai pihak. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yang mengatur tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), termasuk didalamnya memuat Bagan Akun Standar (BAS). Peraturan ini dalam implementasinya akan diturunkan ke dalam suatu peraturan kepala daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu juga merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sebagai entitas pemerintah, Kota Bengkulu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bengkulu juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada *stakeholder* berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 tahun 2010.

Dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual, maka diperlukan dukungan sumberdaya yang memadai. Sebab sumberdaya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini meliputi aparat pemerintah yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.

Selanjutnya dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual diperlukan sarana dan prasarana yang baik. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Salah satu sarana dan prasarana adalah teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. SAP dan beberapa regulasi lainnya digunakan untuk mereduksi penyalahgunaan *creative accounting*, *earning management* dan lainnya. Untuk itulah peran dari regulasi dan sistem yang beroperasi dengan baik akan menjadi penunjang dalam sebuah instansi beroperasi dengan efektif dan efisien.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam penerapan SAP berbasis akrual adalah komitmen organisasi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi. Simanjuntak (2010), menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana dekonsentrasi. Dalam suatu organisasi memiliki komitmen yang berbeda-beda yang akan berdampak juga dalam penerapan akuntansi.

Beragam penelitian yang telah dilakukan Kusuma (2013), Ara (2014), dan Erlita (2015) sebelumnya membuktikan hasil yang berbeda-beda, hal tersebut menjadi celah untuk peneliti dalam melakukan penelitian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Perbedaan penelitian ini dari peneliti-peneliti sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti menilai kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dari beberapa indikator yaitu, sumber daya manusia, kebijakan akuntansi, infrastruktur, teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat judul "Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bengkulu". Berdasarkan uraian diatas, rumusan permasalahan dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut: 1) Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? 2) Apakah infrastruktur berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? 3) Apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? 4) Apakah komitmen organisasi berpengaruh

positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? 5) Apakah kebijakan akuntansi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual? Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pengaruh sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 2) Pengaruh infrastruktur terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 3) Pengaruh teknologi informasi terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 4) Pengaruh komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. 5) Pengaruh kebijakan akuntansi terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (3)).

Akuntansi pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Disamping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku (Nordriawan, 2012:4). Nordriawan (2012:7), juga menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu: pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan.

Penerapan akuntansi pada pemerintahan sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Menurut Halim (2012), pada sistem pencatatan *single entry*, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki catatan tentang piutang dan utang, apalagi catatan tentang aset tetap yang dimiliki dan ekuitas, sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca sebagai salah satu bentuk laporan keuangan guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Permendagri Nomor 64 tahun 2013).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013, basis akuntansi kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013, basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Kesiapan Pemda dalam Penerapan SAP Berbasis Akrual

Herlina (2013), mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Ara (2014), adalah sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi, proses, konteks, dan individu, secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status *quo*. Adapun kesiapan penerapan SAP berbasis akrual bisa dilihat dari aspek berikut ini:

- Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan /organisasi. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuand ari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan (Putri, 2012).

- Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg and Fontane, 2000).

- **Teknologi informasi**

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (Haryanto, 2012). Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar.

- **Komitmen Organisasi**

Aldiani (2009), menyatakan bahwa komitmen organisasi sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Komitmen yang tinggi dari aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

- **Kebijakan Akuntansi**

Pengertian kebijakan akuntansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (6) adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pemerintah terdiri dari kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengembangan Hipotesis

SDM dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrua

Nazier (2009), mengungkapkan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Tingkat pemahaman dasar meliputi lingkup keuangan negara, bentuk pertanggung jawaban keuangan negara, standar akuntansi yang digunakan, dan substansi standar akuntansi pemerintahan. Sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Kusuma, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2012), juga mengungkapkan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh pada tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil yang sama juga ditemukan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan Aldiani (2009), dan Herlina (2013), menunjukkan bahwa SDM memiliki korelasi yang kuat sebagai faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi sistem akuntansi basis akrua. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Erlita (2015) dan Friska (2015), yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada tidak memiliki kemampuan pendidikan dasar dibidang akuntansi dalam menunjang keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Infrastruktur dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI.

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 2000). Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), membuktikan bahwa kesiapan penerapan SAP berbasis akruaI dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana

Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Infrastruktur berpengaruh positif terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Teknologi Informasi dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI.

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi (Haryanto, 2012). Kusuma (2013), menunjukkan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

Penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2013), yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akruaI. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aldiani (2009), bahwa perangkat pendukung mampu menjelaskan keberhasilan penerapan PP No.24 Tahun 2005. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ara (2014), mengatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akruaI. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

Komitmen Organisasi dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI.

Menurut Robbins (2006), komitmen organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sarasanya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis ini, diungkapkan oleh Aldiani (2009), yang menyebutkan komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP Nomor 24 tahun 2005 serta penelitian oleh Ara (2014), mengatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akruaI. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI

Kebijakan Akuntansi dan Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

Pengertian kebijakan akuntansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (6) adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan bertujuan agar suatu instansi tertib administrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah menetapkan peraturan kepada daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sehingga nantinya dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar tersebut dapat menghasilkan suatu data keuangan yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian oleh Herlina (2013), membuktikan bahwa secara simultan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap zgb ,akuntabilitas kinerja. Hasil yang sama juga terdapat pada hasil penelitian oleh Ara (2014), yang berhasil membuktikan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Kebijakan Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk kausalitas untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data dalam bentuk angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2012 : 12).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen: Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI

Variabel dependen ini diindikasikan dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi dan kebijakan akuntansi. Kesiapan penerapan SAP berbasis akruaI diukur dengan 8 butir pertanyaan.

Variabel Independen: Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Sumber daya manusia terdapat beberapa indikator yaitu: *Level of responsibility*, Kompetensi, Loyalitas,

Variabel Independen: Infrastruktur

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 2000).

Variabel Independen: Teknologi informasi

Teknologi informasi adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan

mengkomunikasikan informasi (Haryanto,2012). Ada beberapa indikator mengenai teknologi informasi yaitu: Sistem Manajemen Informasi, Perangkat Lunak SAP, Pelatihan Sistem / pendampingan.

Variabel Independen: Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2006), komitmen organisasi adalah keadaan dimana pegawai mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasarannya serta berharap mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Hal ini dapat ditandai dengan empat indikatornya: Kepercayaan pegawai terhadap organisasi, Partisipasi pegawai dalam aktivitas kerja, Loyalitas terhadap organisasi, Adanya perasaan menjadi bagian dari organisasi.

Variabel Independen: Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (6) adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian ini kebijakan akuntansi diukur dengan 10 soal pilihan ganda tentang akuntansi berbasis akrual. Soal yang digunakan berasal dari Permendagri No. 64 tahun 2013.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling (judgement)*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah: pegawai di sub bagian keuangan, bidang aset, bidang perbendaharaan dan akuntansi, dan bidang anggaran DPPKA Kota Bengkulu.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan pengolahan data melalui *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$K_SAP = \alpha + \beta_1SDM + \beta_2I + \beta_3TI + \beta_4KO + \beta_5KA + \varepsilon$$

Dimana :

K_SAP	: Kesiapan Penerapan SAP
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots$: Koefisien Regresi
SDM	: Sumber daya manusia
I	: Infrastruktur
TI	: Teknologi informasi
KO	: Komitmen organisasi
KA	: Kebijakan akuntansi
ε	: Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 36 eksemplar dan hanya sebanyak 32 eksemplar saja yang kembali. Dari jumlah kuesioner yang kembali tersebut, semua eksemplar diisi lengkap dan memenuhi kriteria sampel yang

akan digunakan sebagai unit analisis. Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis		Mean Teoritis	Kisaran Aktual		Mean Aktual	Standar Deviasi
		Min	Maks		Min	Maks		
Kesiapan Pemda	32	8	40	24	15	36	30,9	3,719
Sumber daya manusia	32	17	85	51	25	77	67,44	8,973
Infrastruktur	32	12	60	36	12	58	46,44	7,931
Teknologi informasi	32	7	35	21	7	31	26,50	4,458
Komitmen organisasi	32	4	20	12	4	20	15,47	2,805
Kebijakan akuntansi	32	5	25	15	13	25	20,12	3,900

Berdasarkan pada tabel 1 untuk variabel sumber daya manusia yang diindikasikan dengan *level of responsibility*, kompetensi, loyalitas, dan motivasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata aktual sebesar 67,44 dengan standar deviasi 8,973. Dengan demikian dapat dilihat bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata aktualnya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sumber daya manusia yang digunakan dalam penelitian ini tidak bervariasi, dimana tingginya jawaban responden menunjukkan tingkat *level of responsibility* dan kompetensi yang baik. Semakin tinggi jawaban responden, maka semakin tinggi tingkat *level of responsibility*, kompetensi, loyalitas, dan motivasi yang dimiliki setiap pegawai.

Pada statistik deskriptif variabel infrastruktur yang diindikasikan dengan tersedianya sarana dan prasarana. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel infrastruktur adalah sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 58. Hasil ini berarti bahwa infrastruktur yang dimiliki DPPKA Kota Bengkulu dikategorikan telah siap untuk menunjang keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Rata-rata aktual infrastruktur adalah sebesar 46,44 dengan standar deviasi sebesar 7,931. Hal ini menggambarkan bahwa nilai yang jauh lebih kecil antara standar deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi dari variabel infrastruktur dari observasi tidak bervariasi.

Pada deskriptif statistik variabel teknologi informasi yang diindikasikan dengan sistem manajemen informasi, perangkat lunak SAP, pelatihan sistem. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel teknologi informasi adalah sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 31. Hasil ini menunjukkan bahwa manajemen teknologi informasi yang diterapkan pada tiap-tiap bagian di DPPKA Kota Bengkulu telah dilakukan dengan baik. Rata-rata aktual teknologi informasi adalah sebesar 26,50 dengan standar deviasi sebesar 4,458. Hal ini menggambarkan bahwa nilai yang jauh lebih kecil antara standar deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi dari variabel teknologi informasi dari observasi tidak bervariasi.

Pada deskriptif statistik variabel komitmen organisasi yang diindikasikan dengan kepercayaan karyawan terhadap organisasi, partisipasi karyawan, loyalitas, dan perasaan menjadi bagian dari organisasi. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel komitmen organisasi adalah sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 20. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai yang ada pada tiap-tiap bagian di DPPKA Kota Bengkulu memiliki komitmen organisasi

yang tinggi dalam bekerja. Rata-rata aktual komitmen organisasi adalah sebesar 15,47 dengan standar deviasi sebesar 2,805. Hal ini menggambarkan bahwa nilai yang jauh lebih kecil antara standar deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi dari variabel komitmen organisasi dari observasi tidak bervariasi.

Pada deskriptif statistik variabel kebijakan akuntansi yang diindikasikan dengan pemahaman akuntansi. Nilai minimum yang dimiliki oleh variabel kebijakan akuntansi adalah sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 25. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai yang ada pada tiap-tiap bagian di DPPKA Kota Bengkulu memahami kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dan telah siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Rata-rata aktual kebijakan akuntansi adalah sebesar 20,12 dengan standar deviasi sebesar 3,900.

Hal ini menggambarkan bahwa nilai yang jauh lebih kecil antara standar deviasi dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi dari variabel kebijakan akuntansi dari observasi tidak bervariasi.

Uji Validitas Data

Pengujian validitas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Item pertanyaan yang dimasukkan dalam analisis adalah item pertanyaan yang memiliki nilai korelasi signifikansi pada level dibawah 5%. Hasil pengujian validitas data disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pearson Colleration (Validitas)	Signifikan	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0,488**,-0,857**	0,000-0,004	Valid
Infrastruktur	0,710**,-0,852**	0,000-0,000	Valid
Teknologi Informasi	0,700**,-0,856**	0,000-0,000	Valid
Komitmen Organisasi	0,820**,-0,923**	0,000-0,000	Valid
Kebijakan Akuntansi	0,041-0,549**	0,000-0,025	Valid
Kesiapan Pemda	0,367*,-0,839**	0,000-0,039	Valid

Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa koefisien *pearson correlation* untuk setiap skor total variabel sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi, kebijakan akuntansi, dan kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penelitian ini dinyatakan valid dengan tingkat signifikansi 0,05.

Uji Reliabilitas Data

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* $\geq 0,7$ (Ghozali, 2013). Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0,938	Reliabel
Infrastruktur	0,943	Reliabel
Teknologi Informasi	0,891	Reliabel
Komitmen Organisasi	0,910	Reliabel
Kebijakan Akuntansi	0,721	Reliabel
Kesiapan Pemda	0,701	Reliabel

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach alpha* terhadap variabel sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi, kebijakan akuntansi, dan kesiapan pemda yang masing-masing $\geq 0,7$, ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliable*.

Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas non parametik. Uji non parametik yang digunakan adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika probabilitas (sig.) \geq alpha 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil dari pengujian normalitas disajikan pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4
Hasil Normalitas Data Sebelum Membuang Data Outlier

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Test	Asymp.Sig.(2-tailed)	Kesimpulan
Sumber Daya Manusia	1,277	0,076	Normal
Infrastruktur	1,397	0,040	Tidak Normal
Teknologi Informasi	1,276	0,077	Normal
Komitmen Organisasi	1,309	0,065	Normal
Kebijakan Akuntansi	1,386	0,043	Tidak Normal
Kesiapan Pemda	1,357	0,050	Normal

Tabel 5
Hasil Normalitas Data Setelah Membuang Data Outlier

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Test	Asymp.Sig.(2-tailed)	Kesimpulan
Sumber Daya Manusia	1,277	0,076	Normal
Infrastruktur	1,397	0,084	Normal
Teknologi Informasi	1,276	0,077	Normal
Komitmen Organisasi	1,309	0,065	Normal
Kebijakan Akuntansi	1,386	0,055	Normal
Kesiapan Pemda	1,357	0,050	Normal

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* model variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, komitmen organisasi, komitmen organisasi, dan kesiapan pemda lebih besar dari nilai alpha 0,05 (5%). Sedangkan untuk variabel infrastruktur dan kebijakan akuntansi nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih kecil dari nilai alpha 0,05 (5%) yang artinya distribusi data yang tidak normal. Salah satu cara untuk mengatasi data yang tidak normal adalah dengan membuang data outlier. Setelah membuang data outlier terlihat pada tabel 5 terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* model semua variabel lebih besar dari nilai alpha 0,05 (5%). Dengan demikian data untuk masing-masing model yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada lampiran 1.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dalam lampiran terlihat nilai signifikan koefisien variabel infrastruktur 0,017 lebih kecil dari 0,05 yang artinya terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengatasi data yang

terkena heteroskedastisitas adalah mentransformasikan data dalam bentuk logaritma. Setelah dilakukan transformasi data terlihat pada lampiran menunjukkan nilai signifikan koefisien korelasi semua variabel terhadap residual $\geq 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi lagi heteroskedastisitas atau dengan kata lain merupakan model regresi yang baik.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa diduga sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Uji Hipotesis dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koef. Regresi	t hitung	Sig
Konstanta	8,714	2,693	0,012
SDM	0,319	6,614	0,000
Infrastruktur	0,372	7,12	0,000
Teknologi Informasi	0,606	5,796	0,000
Komitmen Organisasi	0,916	5,241	0,000
Kebijakan Akuntansi	0,328	0,472	0,640
<i>R Square</i>		0,699	
<i>Adjusted R</i>		0,641	
F		12,084	
<i>Sig</i>		0,000	

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis pertama membuktikan bahwa sumber daya manusia mempengaruhi secara positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegawai tiap-tiap bagian di DPPKA Kota Bengkulu memiliki kompetensi mengerjakan tugasnya sehingga dapat mempermudah instansi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan instansi. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi dan tanggung jawab yang dimiliki para pegawai maka akan semakin tinggi tingkat keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil ini sejalan dan mendukung hasil penelitian Rahmayati (2012), dan Ara (2014) yang menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh dengan keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlita (2015) dan Friska (2015), yang mengatakan bahwa sumber daya manusia yang ada tidak memiliki kemampuan pendidikan dasar dibidang akuntansi dalam menunjang keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis kedua membuktikan bahwa infrastruktur mempengaruhi secara positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Artinya dalam bekerja para pegawai didukung dengan peralatan-peralatan yang baik dan mempermudah mereka dalam bekerja. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya infrastruktur yang baik membuat para pegawai merasa nyaman dan bersungguh-sungguh dalam bekerja.

Dukungan infrastruktur yang baik dari instansi tersebut akan mempermudah setiap pegawai pada tiap-tiap bagian di DPPKA Kota Bengkulu dalam pemahaman dan penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan elemen penting dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada suatu instansi. Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung penelitian Kusuma (2013), yang membuktikan bahwa kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dipengaruhi oleh tersedianya infrastruktur yang baik. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa infrastruktur yang baik akan meningkatkan keberhasilan dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis ketiga membuktikan bahwa teknologi informasi mempengaruhi secara positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi informasi yang meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), *data base*, jaringan (*internet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi di DPPKA terintegrasi dengan baik.

Hasil jawaban responden dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa pegawai yang bekerja pada setiap bagian didukung dengan teknologi informasi yang baik dan *terintegritas*, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam bekerja. Dengan teknologi informasi yang canggih dalam suatu instansi dapat mengurangi biaya pengolahan dan pengukuran dibandingkan dengan instansi yang memiliki teknologi informasi yang kurang canggih.

Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil penelitian Aldiani (2010), dan Kusuma (2013), yang memperlihatkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas teknologi informasi dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan teknologi informasi yang dimiliki pemda Kota Bengkulu akan mempengaruhi kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis keempat membuktikan bahwa komitmen mempengaruhi secara positif terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan. Bekerja dengan maksimal dalam hal ini antara lain bekerja keras, ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya, senang dan peduli terhadap organisasi tempatnya bekerja. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi pemerintahan akan tercapai dengan sumbangsih mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja.

Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi relatif lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemda dalam menyusun dan mencapai target anggaran yang ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil penelitian Aldiani (2009), dan Ara (2014), yang membuktikan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu dalam penelitian ini pegawai tiap-tiap bagian DPPKA Kota Bengkulu untuk berusaha keras mencapai tujuan instansi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Hasil penelitian ini juga menunjukkan jika komitmen organisasi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu semakin tinggi, maka akan meningkatkan kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada hipotesis kelima membuktikan bahwa kebijakan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Artinya pegawai pada tiap-tiap bagian di DPPKA Kota Bengkulu memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tetapi belum diterapkan secara optimal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pasal 1 menyebutkan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kebijakan keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang dilihat dari pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini diindikasikan bahwa para pegawai memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang baik tetapi dalam proses dan pelaksanaan akuntansinya dilakukan dengan baik dan benar sampai menjadi suatu laporan keuangan. Penyebab lainnya juga dimungkinkan karena adanya perbedaan kondisi yang terjadi dalam suatu organisasi dimana para pegawai sudah lama menerapkan kebijakan akuntansi, sehingga pada saat adanya perubahan para pegawai tidak perlu melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut. Hal lain yang memungkinkan menyebabkan terjadi tidak ada pengaruh antara kebijakan akuntansi dengan kesiapan penerapan SAP adalah praktik yang ada tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan akuntansi yang baik yang diterapkan pemda Kota Bengkulu akan memberikan pengaruh tetapi tidak berdampak terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dengan sampel penelitian pegawai di DPPKA Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang diketahui bahwa lima hipotesis yang diajukan, empat hipotesis yang diterima, sedangkan satu hipotesis ditolak. Faktor sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Keterbatasan

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, dimana keterbatasan tersebut yaitu: 1) Variabel independen yang diamati sebagai faktor yang mempengaruhi variabel dependen kesiapan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terbatas pada variabel sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kebijakan akuntansi. 2) Indikator variabel kebijakan akuntansi tidak bisa menjelaskan hubungan antara variabel kebijakan akuntansi dengan kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. 3) Dalam penelitian ini, kuesioner yang disebar hanya terbatas pada beberapa pegawai saja.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang diambil, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti faktor sosial ekonomi, letak geografis, dan pengaruh politik. 2) Peneliti selanjutnya diharapkan mengganti indikator untuk variabel kebijakan akuntansi. 3) Peneliti selanjutnya diharapkan menyebarkan kuesioner kepada semua pegawai yang ada di setiap SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Ara, Adventana Gabriella. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No. 71 Tahun 2010. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta: tidak dipublikasikan.
- Aldiani, Sulani. 2009. Faktor-faktor pendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah No.24 Tahun 2005 pada pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Simposium Nasional Akuntansi XII* Palembang.
- D.S, Erlita.. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKP Minahasa Selatan. *Journal EMBA*. Vol.3. No.1. (Maret): 388-397.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Grigg, Neil & Fontane G. Darrel. 2000. *Infrastructure System Management & Optimization*. Internasional Seminar "Paradigm & Strategy of Infrastructure Management" Civil Engineering Departement Diponegoro University.
- Halim, Abdul, dan M.S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Hariyanto, Agus. 2012. Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Skripsi*. STIE Dharma Putra Semarang: tidak dipublikasikan.
- Herlina, Hetti. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 tahun 2010 (Studi

- Empiris: Kabupaten Nias Selatan). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang: tidak dipublikasikan.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP.
- , 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: KSAP.
- Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah kabupaten Jember). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Jember: tidak dipublikasikan.
- Langelo, Friska, dan David Paul E.S dan Stanly W.A. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Journal EMBA*. Vol.3. No.1. (Maret): 1-8.
- Nazier, Daeng. 2009. Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan. *Seminar Nasional*
- Nordiawan, Deddi. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permendagri No.64 Tahun 2013. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Putri. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan pada Pemda Kab. Bengkalis. *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Univeristas Sriwijaya: tidak dipublikasikan.
- Rahmayati, Fitri. 2012. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementreirian Negara/Lembaga (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Surabaya II). *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: tidak dipublikasikan.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Ke-10. Jakarta: PT Indeks.
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, A. Emilia dan Prasetyono. 2012. Standarisasi Nilai Wajar dan Penggunaan Metode Akuntansi Sebagai Upaya Pengendalian Praktik *Creative Accounting*. *Jurnal InFestasi*. Vol. 8 No.2 Desember 2012. Hal. 195 - 208.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Lampiran 1

Hasil Uji Heteroskedastisitas Sebelum Transformasi Data						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,714	3,235		2,693	0,012
	KA	0,018	0,439	0,005	0,041	0,968
	SDM	0,151	0,098	0,365	1,547	0,134
	I	0,363	0,143	0,775	2,546	0,017
	TI	0,105	0,180	0,126	0,583	0,565
	KO	-0,552	0,1382	-0,416	-1,444	0,161

Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi Data						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,517	0,369			,172
	KA	0,007	0,010	0,138	0,721	,477
	LNSDM	0,310	0,162	1,123	1,915	,067
	LNI	-0,064	0,152	-0,324	-0,423	,676
	LNTI	-0,113	0,107	-0,558	-1,053	,302
	LNKO	-0,056	0,144	-0,290	-,391	,699

